



**#1**

## **Kesemestaan dalam Data: Kekuatan Narasi Emik Sembilan Amatan**

**M. Alie Humaedi**

### **A. Mencari Alat Ikat Pendataan: Suatu Pengantar**

Penarasian emik registrasi sosial ekonomi (Regsosek) Badan Pusat Statistik (BPS) RI pada tahun 2022 di 16 wilayah amatan menunjukkan adanya karakter masing-masing wilayah, baik karakter demografis, geografis, sosial budaya, dan termasuk proses pendataan beserta dukungan kelembagaan yang ada. Banyaknya permasalahan yang diangkat, terlebih didekati dengan penelitian kualitatif, memungkinkan narasi terceritakan cukup panjang. Dengan pertimbangan komprehensifitas tulisan, penarasian emik ini pun dipecah menjadi dua seri dalam penerbitan bukunya. Sekalipun dipecah, ruang lingkup pembahasannya sama dan masing-masing seri buku tersebut diberikan alat ikat yang memadai agar hubungan antara Seri 1 dan Seri 2 tetap ada.

---

M. A. Humaedi  
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: mali002@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Humaedi, M. A. (2023). Kesemestaan dalam data kekuatan narasi emik sembilan amatan.  
Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri  
Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 2 Indonesia Tengah-Barat (1–22)*. Penerbit BRIN.  
DOI: 10.55981/brin.777.c703 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8

Pada buku Seri 1, ruang lingkup penarasian emik mencakup wilayah Indonesia Tengah dan Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua). Pemilihan Nusa Tenggara Timur dan bukan Papua Barat sebagai bagian awal narasi buku didasarkan pada pertimbangan adanya tekanan tematik substantif. Keadaan dan fenomena NTT sebenarnya menjadi citra atau gambaran umum kondisi masyarakat Indonesia pada kawasan tengah dan timur. Sekalipun dalam konteks keamanan nasional, NTT relatif aman dan berbeda dengan Papua, namun kondisi keterbatasan, kerentanan, dan kurangnya akses pembangunan menjadi contoh dari tumbuh kembangnya wilayah Indonesia di masa awal.

Setelah bagian Nusa Tenggara Timur, dilanjutkan dengan penarasian Regsosek di Nusa Tenggara Barat, beberapa kabupaten/kota di wilayah pulau Sulawesi, dan diakhiri dengan Papua Barat dan Maluku Utara. Wilayah Indonesia Tengah dan Timur cukup otentik dalam proses pendataannya. Dukungan kelembagaan formal dan informal cukup terasa kuat di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tengah dan timur masih memegang teguh ikatan primordialisme atas nama keluarga, entitas kesukuan, dan jaringan primordialisme lainnya.

Dengan karakter sosial budaya seperti di atas, maka pemilihan Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) yang berasal dari wilayah atau desa setempat menjadi sangat strategis dalam mendukung kelancaran pendataan berbasis rumah tangga atau keluarga pada satuan lingkungan setempat (SLS). Sekalipun ada tuduhan akan terjadi bias atau subjektivitas karena pendata terhubung dengan etnosentrisme atau jaringan kekerabatan yang sama, namun kedua kecenderungan itu dapat ditekan dengan penggunaan metode *geo-tagging* dan pemodelan empat dimensi pada kondisi tempat tinggalnya.

Model penarasian emik pada buku Seri 1 pun diikuti dengan penarasian 9 wilayah untuk buku Seri 2. Ada 9 wilayah amatan yang diangkat pada buku kedua ini, yaitu Balikpapan di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Mempawah di Kalimantan Barat, Sampang di

Jawa Timur, Surakarta di Jawa Tengah, Indramayu di Jawa Barat, Lampung Selatan di Lampung, beberapa lokasi di Aceh, dan Serdang Bedagai di Sumatra Utara.

Daerah Kalimantan Timur menjadi awal pembahasan sebagai bentuk penghargaan terhadap calon wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Alasan lain tentu didasarkan pada upaya memetakan permasalahan data dan pendataan sebelum wilayah ini benar-benar menjadi wilayah IKN. Penarasian emik Regsosek pada momentum seperti ini tentu akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari arkeologi pengetahuan dan menuliskan peristiwa bersejarah bangsa Indonesia. Ruang lingkup yang sama walaupun berbeda karakternya berdasarkan sistem sosial budaya yang berkembang di wilayah masing-masing, memungkinkan buku narasi emik Regsosek Seri 2 sama menariknya dengan buku Seri 1.

Falsafah dasar penulisan buku narasi emik Regsosek pada seri kedua juga sama dengan seri pertama. Falsafah itu terkait pengukuran dan penilaian terhadap kebesaran sebuah bangsa yang mencakup potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi lainnya baik secara kuantitas ataupun kualitas harus dapat dilakukan semaksimal mungkin. Harapannya, kebesaran bangsa dapat diukur dan dikembangkan potensinya dengan cara-cara yang benar dan strategis berbasiskan data. Demikian juga tingkat kerentanan dalam aspek sumber daya, kesehatan, serta keterbatasan akses dan konektivitas yang ada pun harus terpetakan dengan baik. Proses pendataan potensi dan kerentanan sama pentingnya dengan perumusan kebijakan pembangunan yang diperuntukkan kemaslahatannya bagi warga bangsa.

Tujuan pengumpulan data yang valid, akurat, dan transparan selain untuk merencanakan kebijakan dan program yang mensejahterakan kehidupan masyarakat, juga di dalamnya ada penegasan tentang kemandirian dan kedaulatan sebagai sebuah bangsa. Data bukan sekadar deretan angka tak bermakna, tetapi di dalamnya ada kepentingan perencanaan pembangunan yang memadai. Ketiadaan data ataupun data yang kurang valid sama

artinya membawa proses pembangunan yang tidak jelas arahnya dan tidak jelas pula target capaiannya.

Demikian juga klaim atas keberhasilan pembangunan tidak dapat dilakukan serta merta, apalagi ketika dihadapkan pada upaya membangun citra posisi negara di tengah pergaulan internasional. Saat negara tidak memiliki data atau data yang diajukan salah, bagaimana mungkin kita mengajukan diri sebagai negara dalam status tertentu, misalnya status negara maju, status negara G-20, status pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan lainnya.

Data pada aspek-aspek tertentu sesuai dengan ruang lingkup kebutuhannya menjadi bagian tidak terpisahkan dari kedaulatan sebuah bangsa. Untuk kepentingan itu, pencacahan dalam berbagai sisi dilakukan oleh negara. Sensus, survei, ataupun registrasi nasional terkait jumlah penduduk, sosial, dan ekonomi dilakukan untuk kepentingan merancang bangun berbagai kebijakan terkait hal itu.

Pencacahan menjadi garda terdepan dari sebuah proses pembangunan. Arah dan target pembangunan ditetapkan berdasarkan rasional kalkulatif yang didasarkan pada perhitungan *rigid* antara kepemilikan, kebutuhan, dan rasio lainnya. Menafikan kepentingan pencacahan, berarti sama saja mendorong pembangunan bangsa tanpa arah dan tujuan pasti. Akibatnya, empat tujuan negara, khususnya terkait pada perlindungan warga negara, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945 tidak akan terwujud. Keadaan seperti inilah yang harus dihindarkan dalam proses pembangunan negara ini.

Aktivitas rutin sensus penduduk misalnya, secara umum bertujuan untuk mendapatkan data karakteristik dari suatu populasi pada waktu tertentu. Sensus penduduk juga bertujuan untuk membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program-program kependudukan dan sosial, termasuk penetapan kursi beserta beban biaya politik dalam berbagai pemilihan umum legislatif dan eksekutif. Hal ini karena data hasil sensus penduduk tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi juga komposisi, distribusi,

dan karakteristik penduduk, seperti jenis kelamin, usia, bahasa, dan parameter demografi lain yang dianggap perlu.

Data sensus yang didasarkan pada hasil pencacahan di seluruh wilayah berbasis rumah tangga adalah hal yang penting bagi negara dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan di berbagai bidang. Bahkan, tidak jarang data kependudukan juga digunakan oleh sektor industri dalam menskenariokan strategi pemasaran beserta sistem mata rantai produksi-konsumsinya. Ibaratnya, menguasai data berarti juga menguasai mata rantai sektor industri, termasuk konsumen serta perilaku konsumsinya yang memungkinkan target pasar dapat ditentukan secara baik dan strategis.

Selain waktu dan target sensus yang ditetapkan secara maksimal, dari waktu ke waktu juga dilakukan berbagai penyesuaian terkait tujuan, metode, dan ruang lingkup sensus penduduk termasuk pada sensus penduduk tahun 2020. Sebagai contoh, sensus penduduk 2020 tidak hanya untuk melakukan pendataan penduduk saja, tetapi juga untuk mendukung tercapainya satu data kependudukan Indonesia. Hal ini karena kegiatan sensus penduduk terkini dilakukan untuk mendukung proses penyempurnaan data administrasi kependudukan yang dipegang oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Data kependudukan sesungguhnya menjadi basis data untuk berbagai kepentingan dan skenario pembangunan yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itulah, apapun sensus dan survei terkait penduduk beserta potensi dan kerentanannya menjadi sangat penting. Sensus penduduk ataupun registrasi sosial ekonomi merupakan ide modern yang menempatkan penduduk beserta aspek sosial di dalamnya sebagai deret angka, dan diperhadapkan dengan kepentingan tujuan negara. Artinya, sensus dan registrasi menjadi pencacahan lengkap semua orang dan karakteristik penting masyarakat untuk tujuan memahami struktur dasar dan tren masyarakat.

Sejarah telah menunjukkan bagaimana pencacahan secara skala besar pertama kali dilakukan pada populasi Acadia (Nova Scotia) dengan termin 10 kali selama 1671–1714 (Ross & Deveau, 1992;

Hynes, 1973). Italia melakukan lima sensus diantara waktu Unifikasi dan Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1861, 1871, 1881, 1901, dan 1911 (A'Hearn et al, 2021). Sedangkan di Amerika Serikat, sensus periode awal dilakukan pada 1790–1840 dimana data yang disediakan masih pada level rumah tangga dan pada tahun 1850, kemudian dirumuskan data pada level individu (Winkle, 1994).

Inggris melakukan sensus pertamanya pada tahun 1801 (Campbell-Kelly, 1996). Perancis pun melakukan kegiatan pencatatan warga pada tahun 1791 di bawah aturan *ancient regime*, tetapi mendandani tahun 1836 sebagai register populasi yang regular dan sistematis (Haug, 1979). Namun, adanya kelemahan pada sistem administrasinya yang dipandang kurang baik maka perbaikan kegiatan pendataan terus ditingkatkan. Pendataan penduduk akhirnya menjadi cara paling efektif masyarakat modern dalam menetapkan kebesaran suatu bangsa beserta karakter sosial budaya dan ekonominya. Melalui pencacahan juga, suatu negara dapat menetapkan orientasi dan perkiraan (*forecasting*) ke depan atas pengembangan dirinya.

Nilai dari falsafah dasar di atas juga diikuti Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. BPS berdasarkan Undang-undang menjadi penanggung jawab atas pendataan untuk kepentingan negara. Dalam konteks ini, BPS menjadi satu-satunya lembaga negara pemangku data. Jika ada kementerian/lembaga lain yang melakukan kegiatan pendataan, sebenarnya dapat dikatakan sebagai aktivitas di luar tugas dan fungsinya yang berkorelasi pada ketidakefektifan anggaran negara.

Selain persoalan di luar tugas dan fungsi, pendataan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga di luar BPS memungkinkan akan menciptakan kesimpangsiuran dan ketumpangtindihan data yang memicu konflik arus bawah yang mematikan. Silang sengkabut data penerima Bantuan Langsung Tunai atau Bantalan Sosial yang tidak tepat atau salah sasaran misalnya, telah menyebabkan konflik laten di tingkat masyarakat lokal. Kecenderungan kerusakan moral (*moral hazard*) dan menjadi entitas maladaptif (penuh kemenduaan atau kepalsuan) juga semakin hari semakin besar seiring dengan

ketidaktepatan sasaran penerima BLT ataupun program perlindungan dan jaminan sosial lainnya (Nyman & Maude-Griffin, 2001).

Pendataan yang dilakukan secara sektoral telah memicu terjadinya peningkatan persepsi negatif bahwa pendataan itu berhubungan erat dengan penerimaan program bantuan. Akhirnya, setiap pendataan akan berujung pada tuntutan atas bantuan sosial sebagaimana yang dipersepsikan masyarakat. Suasana batin seperti ini yang menyulitkan para pendata di lapangan, termasuk pada perangkat organik dan non organik (mitra) BPS saat bekerja melakukan pencacahan. Keadaan ini telah menciptakan persepsi masyarakat tentang “pencacahan adalah bantuan”.

Salah satu kelebihan BPS adalah ia menjadi satu-satunya lembaga pemangku data yang dijamin oleh Undang-undang. Dengan posisi seperti ini, sistem kelembagaan yang bersifat vertikal memungkinkan tugas dan fungsinya dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik dari pusat hingga daerah. Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas pendataan penduduk beserta aspek-aspek lainnya maka secara rutin BPS pun mengadakan sensus penduduk, sensus sosial ekonomi, berbagai survei aktual, dan registrasi sosial ekonomi.

Dalam konteks sensus, BPS telah dikenal oleh masyarakat di tingkat desa atau wilayah terpencil sekalipun. Hal ini terjadi karena basis data sensus di tingkat rumah tangga memungkinkan nama BPS masuk ke alam kesadaran masyarakat Indonesia. Beberapa penelitian dan penulisan telah banyak dilakukan para akademisi sehingga citra BPS sebagai pemangku dan pelaksana pendataan atas aspek kependudukan, perkembangan sosial ekonomi, dan aspek lainnya masuk menjadi arkeologi pengetahuan dari kelompok pelajar dan terpelajar.

Kenyataan di atas ditambah dengan pemberitaan terus menerus dari media massa, baik cetak maupun *online* yang memberitakan pentingnya sensus penduduk, sensus pertanian, ataupun survei-survei lainnya, terlebih ketika jadwal-jadwal waktu itu telah rutin dilakukan. Angka akhir di urutan tahun akan menjadi rutinitas

atas jadwal sensus atau survei tertentu. Misalnya, angka 0 akan identik dengan sensus penduduk (seperti 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020). Sementara angka 3 di belakang selalu identik dengan sensus pertanian, tahun 2003, 2013, dan 2023. Ada juga angka 6, yaitu dikhususkan untuk sensus ekonomi, seperti tahun 2006, 2016, dan 2026 nantinya. Lalu bagaimana dengan angka-angka lainnya? Angka akhir 1, 2, 4, 5, 7, 8, dan 9 pada umumnya digunakan untuk aktivitas sensus yang direncanakan atau survei yang bersifat sampling dan tidak menyeluruh.

Salah satu sensus yang direncanakan itu adalah registrasi sosial ekonomi (Regsosek). Kata registrasi yang ada telah menunjukkan semacam proses pendaftaran kembali dari data sensus yang ada pada pendataan sebelumnya. Program Regsosek ini semacam sensus karena berbasiskan pada keluarga di satuan lingkungan setempat (SLS). Pendataan Regsosek adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.

Data Regsosek akan menjembatani koordinasi dan berbagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten sebab terhubung dengan data induk kependudukan, serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan. Regsosek mencakup informasi kondisi sosial ekonomi, yang meliputi sebagai berikut: (i) Kondisi sosio ekonomi demografis; (ii) Kondisi perumahan dan sanitasi air bersih; (iii) Kepemilikan aset; (iv) Kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus; (v) Informasi geospasial; (vi) Tingkat kesejahteraan; dan (vii) Informasi sosial ekonomi lainnya.

Selain penghimpunan data di atas, Regsosek juga mengikhtikarkan adanya analisis lokasi dan dimensi keruangan (*geo-tagging*), serta keadaan rumah yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan data bersifat valid, otentik, dan akurat sehingga dapat digunakan untuk kepentingan penetapan rumah tangga penerima program perlindungan dan jaminan sosial di kemudian harinya. Akhirnya, Regsosek adalah pendataan kesejahteraan sosial ekonomi yang bersifat holistik dan integral bagi seluruh penduduk Indonesia.

Tujuan Regsosek yang sangat penting ini perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, tak terkecuali dari lembaga riset dan inovasi, seperti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (PR KSDK BRIN). Dalam konteks perlindungan dan jaminan sosial, Regsosek dapat diposisikan sebagai salah satu strategi pelaksanaan reformasi sistem perlindungan sosial. Upaya pendataan kuantitatif yang berhubungan dengan perlindungan sosial seperti ini perlu dikuatkan dengan penarasian emik kualitatif, baik dalam proses pendataannya maupun dalam substansi data terkait aspek-aspek terkait perlindungan sosial bagi warga negara.

Kata emik yang dimaksud di sini adalah sebuah proses penggalian sudut pandang dari subjek yang diteliti, baik dari kelompok masyarakat umum yang didata ataupun para petugas pendata yang terdiri dari Petugas Pencatatan Lapangan/PPL dan Petugas Pemeriksa Data Lapangan/PML. Sudut pandang subjek tersebut tidak akan terlepas dari karakter sosial budaya (*social cultural specificity*) wilayah-wilayah lokal setempat yang berbeda antara satu dengan lainnya. Penarasian emik pada aktivitas Regsosek berarti menunjukkan adanya upaya mengangkat perspektif dan praktik lokal dalam menerjemahkan aktivitas yang bersifat etik, baik berupa kebijakan, program, ataupun strategi yang berskala nasional dan general. Penerjemahan itu bisa dilihat dari kelompok masyarakat sebagai kelompok target yang didata ataupun para agen penghubung pelaksana kegiatan nasional tersebut. Penarasian emik Regsosek menjadi kekuatan tersendiri dalam mengungkap kedalaman data dan sisi sosial politik atas data yang bersifat lokal.

Bersamaan dengan penyusunan buku seri pertama dengan cakupan 7 wilayah, buku narasi emik seri kedua dengan cakupan 9 wilayah pun disiapkan. Artinya, secara keseluruhan dua seri buku ini mengangkat narasi emik pendataan pada 16 lokasi amatan. Tujuan strategis dari dua seri buku ini adalah menelisik dan menjelaskan proses pendataan Regsosek yang dianggap sebagai sensus model baru sehingga titik kelebihan dan kelemahannya dapat diketahui. Nilai

strategis ini menjadi sangat penting untuk proses pembaharuan atau konstruksi ulang kegiatan Regsosek di masa berikutnya.

Selain tujuan di atas, substansi buku ini juga menawarkan berbagai variabel dan indikator baru yang dapat dikembangkan dalam penentuan terkait aspek-aspek kesejahteraan sosial dan kelayakan penerima program perlindungan dan jaminan sosial. Dua tujuan buku tersebut merupakan sumbangsih para peneliti di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam mendukung segala ikhtiar BPS RI yang berhubungan dengan penguatan tata kelola dan pencapaian tujuan program perlindungan dan jaminan sosial bagi warga negara. Ranah perlindungan sosial merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana strategis dan *flagship* penelitian dan pengembangan yang ditetapkan oleh Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN untuk Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas. Keterlibatan Bersama dengan BPS adalah jalan penting pelaksanaan tugas dan fungsi secara kelembagaan.

## **B. Menelisik Proses dan Memahami Pengalaman dalam Pendataan (Alur Metode)**

Antara buku seri pertama dan seri kedua adalah satu kesatuan yang didasarkan dari proses penelitian dan pendampingan kegiatan Regsosek yang sama. Kegiatan penarasian emik Regsosek tahun 2022 yang dilakukan Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional berada pada dua aspek utama.

*Pertama*, prosesi pendataan yang dilakukan para pelaksana kegiatan, baik Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), atau Petugas Pendataan Lapangan (PPL) yang tersebar di berbagai wilayah. Selain soal pendataan, amatan, dan pengumpulan data juga difokuskan pada pelaksanaan alur bisnis beserta keputusan Kepala BPS kabupaten/kota lokus

amatan dan strategi dari perangkat organik dan non-organik BPS. *Kedua*, subjek data atau individu dan keluarga yang didata. Data amatan dan wawancara ini penting untuk mendapatkan konstruksi baru terkait variabel dan indikator penting yang bisa dikembangkan untuk kepentingan perumusan sistem dan penetapan mekanisme kelayakan penerimaan warga masyarakat yang layak mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosial dari negara.

Kata penarasian emik berarti tertuju pada keseluruhan informasi, sudut pandang, praktik hidup, dan nilai-nilai yang dipedomani berdasarkan karakter sosial budaya tertentu yang berkembang pada dua kelompok subjek penelitian di atas. Kegiatan penarasian emik Regsosek ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang di dalamnya menuntut adanya kedalaman data untuk memahami proses interaksi, perilaku, harapan, dan tujuan yang hendak dicapai di dalamnya. Metode ini dipilih sebagai ikhtiar untuk mendapatkan pemahaman mendalam atas berbagai aktivitas. Di dalamnya dilakukan dengan dua teknik pengumpulan data utama, yaitu: (i) wawancara mendalam terhadap para pelaku lapangan (supervisor, enumerator, dan masyarakat); (ii) observasi atas gesture dan proses pelaksanaan pada seluruh tahapan kegiatan Regsosek.

Pemahaman ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan pengetahuan atas kegiatan pendataan dan perolehan angka yang muncul pasca pendataan itu. Artinya, angka tidak sekadar angka yang dihasilkan dari lembar kuesioner yang ditanyakan pendata kepada subjeknya, tetapi di dalamnya ada makna dan harapan yang dihadirkan oleh subjek yang penuh dengan berbagai motivasi. Oleh karena itulah, wawancara mendalam, observasi terlibat, dan diskusi dilakukan para peneliti terhadap para informan yang berasal dari responden pendataan ataupun dari pelaksana pendata, tokoh masyarakat, dan kelompok pejabat yang dianggap mengetahui prosesi kegiatan, alur bisnis, dan daya dukung pelaksanaan kegiatan Regsosek.

Setelah data itu diperoleh, proses triangulasi data dan sumber data dilakukan secara bersamaan saat di lapangan. Jika termasuk informasi tunggal, seperti *life story* maka triangulasi data akan

dihadapkan pada informan sekitar atau didasarkan pada jawaban-jawaban atas pertanyaan di dalam kuesioner Regsosek. Triangulasi data juga dilakukan dengan mengkonfirmasi informasi yang ada dengan warga pada satuan lingkungan setempat ataupun tokoh yang menjadi pemangku wilayahnya. Amatan keadaan lingkungan sekitar dan lainnya akan dikuatkan dengan data yang berasal dari desa, dinas terkait, dan dokumen lainnya. Tujuannya, data kualitatif yang dihadirkan dari para informan dapat tervalidasi dengan berbagai informasi tertulis yang mendukung. Dalam prosesnya, setiap tim peneliti telah diberikan panduan wawancara, observasi, dan bahkan *outline* sementara yang bisa dikembangkan berdasarkan temuan yang ada di daerah amatannya masing-masing.

Kegiatan pengumpulan data untuk penulisan buku ini dilakukan oleh 32 orang peneliti PR KSDK yang tersebar pada 16 provinsi di Indonesia. Pemilihan kabupaten/kota yang menjadi lokus penelitian didasarkan pada aspek-aspek utama terkait ruang lingkup perlindungan dan jaminan sosial. Aspek terkait kemiskinan ekstrem, angka stunting, perkawinan muda/di bawah umur, rendahnya akses dan konektivitas, minimnya fasilitas publik, kurangnya kualitas kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, banyaknya tenaga kerja migran, minimnya pertanian, dampak buruk pembangunan, dan lainnya yang melekat pada status dan keadaan masyarakat pada sebuah wilayah menjadi dasar pemilihan kabupaten/kota sebagai lokus penelitiannya.

Bisa jadi suatu daerah kabupaten/kota mencakup aspek-aspek tersebut, namun aspek dominan lah yang menjadi pertimbangan utama dari pemilihan suatu daerah tertentu menjadi lokus penelitiannya. Dengan pertimbangan tertentu, maka penelitian atas kegiatan Regsosek pada setiap satu kabupaten/kota dengan cakupan aspek yang ada diamati oleh dua orang peneliti. Mereka bertugas untuk mengamati proses Regsosek dan sekaligus melakukan pengumpulan data terkait variabel dan indikator baru untuk kemiskinan, serta memahami tingkat keberterimaan masyarakat, dukungan kelembagaan sosial tradisi dalam promosi Regsosek, *life story* pendata, dan *life story* keluarga yang didata.

Ada makna penting dibalik penelusuran *life story* subjek data. Dari informasi dan pengalaman sebuah keluarga yang terikat pada lingkungan sekitarnya, bisa dimunculkan variabel dan indikator terbaru terkait kemiskinan dan kesejahteraan yang diharapkan. Aspek inilah yang menjadi tujuan strategis dari pelaksanaan kegiatan kemitraan antara BPS dengan PR KSDK. Harapannya, penelitian dengan metode kualitatif ini dapat (i) memberikan penjelasan dan masukan terhadap proses bisnis pelaksanaan kegiatan register sosial ekonomi bagi BPS; (ii) Mendorong perbaikan proses bisnis berdasarkan data temuan di lapangan, beserta analisis *forecasting* dalam pengembangan ke depannya; dan (iii) Mendokumentasikan seluruh proses kegiatan Regsosek secara emik di berbagai lokasi sebagai pembelajaran baik bagi para pihak dan masyarakat umum tentang potensi dan kendala membangun satu data Indonesia.

### **C. Struktur Penceritaan**

Penelitian atas kegiatan Regsosek 2022 yang dilakukan secara keseluruhan terdiri dari 16 bagian. Jumlah ini didasarkan pada lokus penelitian beserta cakupan aspek utama yang dikembangkan dalam melihat permasalahan di lokasi Regsosek. Dalam menghasilkan tulisan yang komprehensif, seluruh tulisan ini dibagi ke dalam dua buah buku terbitan dengan judul “Mencatat untuk Membangun Negeri 1: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Indonesia Tengah dan Timur” dan “Mencatat untuk Membangun Negeri 2: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Indonesia Tengah dan Barat”.

Pemecahan bagian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan geohistoris kawasan tanpa menafikan karakter masing-masing wilayah dengan ikatan lama dan fenomena umum di pulau besarnya. Pada buku seri pertama terdiri dari sembilan bab. Sementara pada buku seri kedua ini terdiri dari sebelas bab. Satu bab sebagai pendahuluan yang mengikat semua permasalahan dan karakterteristik emik di berbagai wilayah, sembilan bab lainnya adalah narasi emik pada masing-masing wilayah amatannya dan satu bab terakhir sebagai penutup.

Nyaris memiliki kesamaan dengan seri pertama, bab pendahuluan ditulis oleh M. Alie Humaedi dengan judul “Kesemestaan dalam Data: Kekuatan Narasi Emik Sembilan Amatan”. Bagian ini tentu menjadi pengantar dari upaya untuk memberikan pemahaman awal kepada para pembaca terkait proses kegiatan beserta tujuan penarasian emik Regsosek pada sembilan wilayah amatan. Bagian ini juga memberikan dasar-dasar teori dan metode terkait pelaksanaan kegiatan sehingga proses pengamatan dan penarsiannya tetap berada pada standar-standar ilmiah yang ditetapkan dalam dunia kepenulisan.

Tiga bab pertama, semua narasi emik didasarkan pada kawasan pulau Kalimantan. Gugusan pulau ini diposisikan sebagai wilayah Indonesia Tengah yang menjadi batas utama karakter sosial budaya antara wilayah Indonesia Tengah ke Timur, dan Indonesia Tengah ke Barat. Sebagai wilayah tengah dalam gugusan pulau besar Indonesia, karakter sosial budaya di pulau Kalimantan dapat disebut sebagai daerah *hybrid*, silang budaya dari berbagai budaya kelompok etnik yang bertemu. Ia dapat diposisikan sebagai poros dari geohistoris kebudayaan ke arah Tengah dan Timur Indonesia lainnya. Sekalipun pemangku utama di poros Indonesia adalah Bugis-Makassar, namun peran etnik Melayu dan Dayak juga tidak bisa dinafikan begitu saja. Kedua kelompok ini pun menyebar dan menancapkan pengaruhnya hingga ke Indonesia Timur ataupun bagi kelompok Melayu, pengaruhnya hingga ke Haramain (Mekkah dan Madinah).

Di buku seri kedua ini, wilayah Kalimantan Timur menjadi narasi amatan pertama dari gugusan pulau Kalimantan. Tujuannya, memberikan porsi lebih tentang proses pendataan dan kekuatan data dari wilayah yang menjadi Ibu Kota Baru. Narasi emik ini akan menjadi dokumentasi dari pengalaman bersejarah terhadap proses pendataan di wilayah pra IKN. Dokumen ini akan selalu hidup dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap amatan dalam menelisik fenomena tumbuh dan kembangnya masyarakat di wilayah Ibu Kota Baru itu. Apa yang ditulis oleh Nurbaety Setram dan Lindawati tentang “Mencacah di Kota Balikpapan: Sekelumit Kisah dari Kota Terpadat di Kalimantan Timur” memberikan gambaran tingkat kesulitan

pendataan sosial budaya dan ekonomi masyarakatnya. Sebagai wilayah tujuan para rantau, pendataan Regsosek pun mengalami kendala terkait data kependudukan, tingkat kualitas kesehatan, data kepemilikan yang tidak bersifat terbuka, dan akses terhadap bantuan yang ada. Nyaris semua informasi itu samar. Namun demikian, warga kota Balikpapan yang benar-benar “duduk dan berdomisili” pastinya akan ada kejelasan data terkait ruang lingkup yang ditanyakan. Para PPL dan PML berusaha dengan berbagai strategi untuk terus menggali data yang objektif, valid, dan akurat.

Bab ketiga atau bagian kedua dari narasi gugusan pulau Kalimantan, mengangkat judul “Mendata Indonesia “Bumi Handep Hapakat”: Kawasan Lumbung Pangan Nasional Pulang Pisau Kalimantan Tengah”. Narasi emik ini ditulis secara apik oleh Rosita Novi Andari dan Kurnia Suci Indraningsih. Penarasian yang mengalir terkait kondisi geografis, karakter sosial budaya, dan proses pendataan beserta perjuangan para PPL dan PML dalam menggali data benar-benar menjadi pelajaran penting bahwa pencacahan atau pendataan tidaklah semudah dibayangkan orang. Di dalamnya ada komitmen kuat yang diiringi sifat keluwesan dan perilaku yang membangun rasa kepercayaan bagi subjek datanya. Dari narasi emik ini juga dapat diajukan adanya variabel baru terkait kelompok perantau yang terlihat miskin di kota, tetapi kaya di kampung. Artinya, amatan terhadap rumah kontrak dan perilaku harian tidak serta merta memosisikan mereka sebagai kelompok miskin kota. Hal lainnya, pendataan terhadap para perantau tidak serta merta berbasiskan pada cakupan kartu keluarga di daerah asal, tetapi juga bisa didasarkan pada lokasi perusahaan tempat para perantau itu bekerja.

Selaras dengan fenomena perantauan, wilayah Kalimantan Barat mengalami hal serupa. Sekalipun Mempawah berada jauh dari ibu kota provinsi, wilayah ini menjadi rujukan utama dari para perantau Bugis dan Jawa. Apa yang ditulis oleh Eliana Sidipurwanti dan Yumantoko terkait proses Registrasi Sosial Ekonomi di Mempawah, Kalimantan Barat menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya terjadi pada kelompok perantau, tetapi juga pada kelompok masyarakat setempat.

Hasil kebun sekalipun yang memiliki tanah luas rupanya tidak serta merta dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keadaan ini menjadi salah satu tawaran indikator baru yang bisa dirumuskan oleh BPS bahwa kepemilikan luasan lahan tidak menjadi indikator kesejahteraan. Luasan tanah tanpa intensifikasi pertanian yang memadai tidak akan menghantarkan pada peningkatan kesejahteraan. Terkait teknis pendataan, wilayah perkebunan yang berada di dalam kampung atau memisahkan antar kampung telah menyulitkan proses pendataan yang dilakukan PPL dan PML. Jarak yang jauh dan sepi menjadi tantangan tersendiri dari para pelaksana pendata itu.

Setelah narasi emik Regsosek pada tiga wilayah keterwakilan di gugusan pulau Kalimantan selesai tertulis maka narasi emik mulai mengangkat gugusan pulau Jawa yang sarat dengan berbagai fenomena sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dimulai dari Sampang Madura di Jawa Timur, narasi emik di pulau Jawa dimulai. Kekuatan gotong royong dan sistem kekerabatan masyarakat Madura dipotret sebagai bagian tidak terpisahkan dari narasi emik ini. Demikian juga proses pendataan yang dilakukan oleh tim PPL dan PML yang menghadapi rintangan geografis, tingkat kemiskinan yang parah, dan lainnya juga dikisahkan oleh Nyi R Irmayani dan Pratiwi dalam tulisannya yang berjudul “Menelisik Simpang Regsosek di Kabupaten Sampang: Refleksi Kualitatif”. Sebagai wilayah ujung timur utara Jawa Timur dan terpisah dari daratan besar pulau Jawa, wilayah Kabupaten Sampang Madura tentu memiliki karakternya sendiri. Angka kemiskinan yang cukup tinggi terlihat jelas pada pola permukiman dan perumahan, serta ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan. Demikian pula fenomena rantau dan urbanisasi juga jelas terlihat. Harapan atas bantuan pemerintah menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pendataan yang dilakukan PPL dan PML. Dari kasus Sampang ini, setidaknya perlu ada *review* baru terhadap indikator kesejahteraan sosial terkait beban biaya ritual dan pelaksanaan beragam tradisi. Biaya besar atas pelaksanaan ritual tersebut memungkinkan rasio kalkulatif atas penghasilan pun akan masuk ke dalamnya. Kemiskinan

ekstrem yang disebabkan oleh praktik-praktik kultural sangat terasa di masyarakat Sampang Madura.

Setelah dari Jawa Timur, bab kelima buku ini difokuskan pada wilayah yang benar-benar kota. Kota Surakarta merupakan jantung wilayah provinsi Jawa Tengah. Selain sebagai pusat kebudayaan, di wilayah Surakarta ini juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada dua dekade terakhir. Banyak perusahaan atau industri yang menanamkan investasinya di wilayah ini dan sekitarnya. Ketika penanaman modal tinggi maka mau tidak mau wilayah kota ini pun akan siap menjadi tujuan rantauan dari wilayah lainnya. Sebagai kota lama, bentangan wilayah Surakarta ini sebenarnya telah padat dan sempit di masa sebelumnya. Keadaan ini semakin runyam ketika banyak industri yang menyedot banyak tenaga kerja datang ke wilayahnya. Penduduk yang padat dan ditambah dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi yang mencakupinya menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendataan yang dilakukan oleh PPL dan PML. Secara cermat, Nuzul Solekhah dan Rachmini Saparita menuliskan fenomena sosial budaya beserta kesulitan para PPL dan PML Regsosek ini ke dalam tulisan yang berjudul “Merefleksikan Makna Pendataan dari Kampung Padat Penduduk: Regsosek di Surakarta”. Dari konteks penarasian emik wilayah Surakarta, setidaknya ada rumusan strategi yang ditawarkan dalam proses pendataan. Dukungan kelembagaan tradisi, seperti kaum bangsawan dan kelompok abdi dalam kerajaan menjadi sangat penting dalam kelancaran kegiatan pendataan. Artinya, sosialisasi tidak hanya dilakukan pada tataran formal pemerintahan saja, tetapi juga pelibatan para pengampu wilayah di masa lalu juga menjadi tipe ideal sosialisasi Regsosek.

Siapa tidak kenal Indramayu di Jawa Barat? Sebuah wilayah yang berada di Pantai Utara Pulau Jawa ini sangat akrab dengan pengembangan tradisi seni Dangdut Pantura. Namun, keterkenalannya bukan saja pada soal dangdutnya saja, tetapi BPS mencatat bahwa pergerakan manusia dari Indramayu ke luar negeri sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ini menjadi pemasok utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara di Asia. Alasan tidak

mau kalah secara ekonomi dengan tetangganya sering kali menjadi motif utama seseorang berangkat ke luar negeri untuk menjadi PMI. Jeratan hutang sering kali terjadi seiring niatan dan perilaku sosial ini. Bertahun-tahun banyak kepala keluarga, anak, ataupun istri berangkat ke luar negeri. Uang penghasilan dari luar negeri ditujukan untuk membayar hutang, memenuhi kebutuhan hidup keluarga di kampung, dan membangun rumah tembok yang mewah. Fenomena “rumah gedong tetapi kosong perabotan” sering kali terlihat jelas di dalam kehidupan masyarakatnya. Fenomena ini akhirnya dapat menjadi tawaran indikator baru, bahwa lantai keramik, dinding tembok, dan atap berplafon tidak selalu identik sejahtera. Rumah itu adalah tabungan sesaat yang dilakukan selama bekerja di luar negeri karena setelah dua atau tiga bulan kembali ke kampung maka para PMI itu akan kembali miskin dan terlilit hutang kembali untuk biaya hidup dan keberangkatan berikutnya ke luar negeri. Fenomena ini juga menyulitkan para PPL dan PML dalam melakukan pendataan. Sirkulasi ekonomi yang cepat habis memungkinkan penilaian angka nominal dalam satu tahun terakhir sulit sekali dilakukan. Persoalan kesulitan dan usulan indikator baru ini ditulis secara apik oleh Nurul Hilmiahi dan Dian Karinawati Imron dengan judul bab VI “Registrasi Sosial Ekonomi di Indramayu: Memahami Kemiskinan dengan Kelindan Persoalan Sosial di Wilayah Agraris–Maritim”.

Tiga lokasi amatan sebagai keterwakilan pulau Jawa kita tinggalkan. Amatan terakhir tentu pada pulau Sumatra yang membentang dari ujung barat pulau Jawa hingga batas wilayah India dan Srilangka di ujung baratnya. Ada tiga wilayah amatan yang menjadi keterwakilan dari pulau Sumatra, yaitu Lampung, Aceh, dan Sumatra Utara. Pada bab ketujuh, Slamet Rahmat Topo Susilo, dan Habibullah mengangkat judul “Mendata Lampung, Menemukan Potensi”. Tulisan ini diawali dari akar sejarah wilayah dan masyarakat Lampung yang sarat dengan pertemuan berbagai kelompok etnik Lampung, Jawa, Melayu, Banten, Bali, dan lainnya. Pengembangan masyarakat dan wilayah Lampung Selatan khususnya tidak terlepas dari campur tangan kerajaan dan kolonial di masa lalu. Berbagai kebijakan di masa lalu memungkinkan

adanya temu jumpa dan pembauran berbagai kelompok etnik di wilayahnya. Program kolonisasi dan transmigrasi menjadi tonggak paling penting dalam pembukaan dan perkembangan wilayah Lampung Selatan. Pembukaan wilayah yang diwarnai dengan ikhtiar perkebunan untuk pasokan ekspor memungkinkan perkembangan lebih lanjut *livelihood system*-nya pun berorientasi di dunia pertanian, khususnya perkebunan, ladang, dan sawah. Penduduk setempat rata-rata memiliki lahan cukup luas, walaupun pengelolaannya kurang maksimal. Sementara kelompok transmigrasi, sekalipun kepemilikan lahannya kecil, namun tata kelolanya cukup baik dan intensif sehingga menghasilkan keuntungan yang cukup besar dalam pemenuhan kebutuhan minimalnya. Perbedaan karakter pengelolaan lahan seperti ini pun terlihat nyata dalam pendataan yang dilakukan para PPL dan PML Regsosek. Apa yang ditemukan di Lampung Selatan nyaris sama dengan apa yang ditemukan di Kalimantan Barat, khususnya soal usulan indikator baru terkait tingkat kesejahteraan bahwa luasan kepemilikan tanah tidak selalu berkorelasi dengan keterpenuhan kebutuhan minimal suatu keluarga. Keragaman pengelolaan dan intensifikasi pertanian dapat menjadi indikator baru terkait tingkat kesejahteraan yang dapat dimasukkan dalam variabel Regsosek di masa berikutnya.

Dari ujung Sumatra bagian Timur, buku ini menggesernya ke bagian ujung barat pulau Sumatra, yaitu Aceh. Sementara wilayah Sumatra Utara dipilih sebagai bagian terakhir dari tulisan ini. Fenomena Aceh, sebagai provinsi paling ujung barat ini cukup otentik. Aceh dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisinya. Daerah ini juga memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, baik di wilayah daratannya ataupun di wilayah lautannya. Sayangnya, dalam beberapa dekade sebelumnya, wilayah Aceh menjadi daerah konflik yang memilukan dan ditambah dengan tsunami besar yang meluluhlantakkan wilayah pantai. Dalam kejadian itu ratusan ribu orang meninggal dan hilang. Di saat itu, Aceh seolah kembali ke titik nadir peradaban. Masyarakat pun sedikit demi sedikit mengolah hidupnya kembali untuk sejahtera. Pengembangan usaha kelautan dan

kebun dikelola secara baik untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Meskipun demikian, kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah sangat terlihat nyata. Temuan dan analisis dari Eko Wahyono dan Badrun Susantyo yang dikemas dengan judul “Dari Km 0 (Nol), Ujung Barat Indonesia: Mencari Makna Di Balik Data” menunjukkan fenomena ini.

Bagian selanjutnya ditulis oleh Ririn Purba dan Fedrickson Haradongan terkait Sumatra Utara. Keduanya mengangkat judul “Tanah Bertuah Negeri Beradat: Kabupaten Serdang Bedagai” untuk melihat fenomena kemiskinan perkotaan. Meskipun wilayah ini berdekatan dengan ibu kota Sumatra Utara, namun akses kesejahteraan sangat minim. Bahkan, seiring pembangunan jalan tol yang menghubungkan berbagai wilayah di Sumatra Utara, melahirkan dampak negatif bagi pengembangan UMKM yang di dalamnya selama ini mampu menjamin kesejahteraan sosial para pelakunya. Masyarakat harus berusaha mencari pendapatan lain di luar UMKM dengan menawarkan jasa dan keahlian. Namun, keadaan ini tidak semua bisa sehingga pemenuhan kebutuhannya hanya berkisar pada perdagangan kecil dan menggantungkan harapannya pada pemerintah dan masyarakat sekitar.

Fenomena permukiman yang padat dan rawan bencana banjir juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat miskin pinggiran kota Medan ini. Keadaan ini pula yang membuat tingkat kesulitan para PPL dan PML dalam melakukan pendataan. Kesulitan ini ditambah dengan pengalaman buruk kelompok Tionghoa yang bermukim di wilayah tersebut, yang sering kali didata, tetapi tidak memberikan manfaat sedikitpun bagi mereka. Pengalaman buruk inilah yang menciptakan kesulitan tersendiri bagi para PPL dan PML Regsosek di tahun 2022. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, dukungan tokoh lokal dan kelembagaan sosial menjadi sangat penting. Pembelajaran baik dari kasus Regsosek di wilayah Serdang Bedagai adalah dukungan lembaga informal dan tokoh masyarakat dalam proses pendataan. Fenomena ini sangat jarang ditemui di berbagai wilayah amatan lainnya.

Bagian terakhir dari buku ini merupakan penutup yang ditulis Dian Karinawati Imron dalam bab “Jejaring Makna dan Impresi Nilai: Merajut Simpul Pembelajaran Regsosek”. Bab ini merangkum temuan penting dari sembilan lokasi pendataan. Makna-makna pendataan tidak hanya dipotret tetapi juga dihubungkan dalam jejaring tema untuk kemudian menghasilkan konstruksi makna. Konstruksi makna dari berbagai pengalaman pendataan potensial dikembangkan sebagai strategi perbaikan pendataan di masa mendatang.

Rangkaian pembahasan yang mengangkat sisi emik aktivitas Regsosek tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sekaligus pembelajaran bahwa proses pendataan yang terlihat sederhana dengan cara menanyakan sebagaimana dalam daftar pertanyaan di kuesioner, pada praktiknya memiliki kesulitan tersendiri. Para petugas lapangan berusaha untuk membangun hubungan baik (*rapport*) dalam waktu pendek untuk mendapatkan kepercayaan dari subjek data. Dalam konteks tertentu, Regsosek adalah sebuah peristiwa bersejarah yang perlu direkam dan ditransmisikan segala nilai baik, kendala, kelemahan, dan kelebihanannya. Buku ini hadir untuk menjadi bagian dari peristiwa bersejarah itu.

## Referensi

- A’Hearn, B., Delfino, A., & Nuvolari, A. (2022). Rethinking age heaping: a cautionary tale from nineteenth-century Italy. *Economic History Review*, 75(1), 111–137. <https://doi.org/10.1111/ehr.13087>
- Campbell-Kelly, M. (1996). Information technology and organizational change in the British census, 1801–1911. *Information Systems Research*, 7(1), 22–36. <http://www.jstor.org/stable/23010787>
- Haug, C. J. (1979). Manuscript census materials in France: the use and availability of the listes nominatives. *French Historical Studies*, 11(2), 258–274. <https://doi.org/10.2307/286604>
- Hynes, G. I. (1973). Some aspects of the demography of port royal, 1650–1755. *Acadiensis*, 3(1), 3–17. <http://www.jstor.org/stable/30302422>

- Nyman, J. A. & Maude-Griffin, R. (2001) The welfare economics of moral hazard. *International Journal of Health Care Finance and Economics*. 1, 23–42, <https://doi.org/10.1023/A:1011547904553>
- Ross, S. & Deveau, A. (1992). *The acadians of nova scotia: past and present*. Nimbus
- Winkle, K. J. (1994). The United States census and community history. *The History Teacher*, 28(1), 87–101. <https://doi.org/10.2307/494293>